

Rencana aksi
Memperbaiki gender
pendekatan sensitivitas
bagi para pemangku
kepentingan media

Indonesia



Perkenalan

Pada bulan Oktober 2023, para profesional media dan perwakilan dari organisasi non-pemerintah (LSM) yang berfokus pada isu gender dari lima negara di Asia Tenggara mengikuti lokakarya selama dua hari di Bangkok, Thailand. Lokakarya ini merupakan bagian dari proyek Aliansi Media Publik, "Kekerasan terhadap perempuan - Membawa perubahan dalam sikap sosial dan kesetaraan gender melalui peningkatan partisipasi media" - proyek ini ditujukan kepada pekerja media dan LSM dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

Selama 3-4 Oktober, lokakarya tersebut bertujuan untuk membangun kapasitas 20 LSM dan pekerja media yang berfokus pada isu gender. Tujuannya? Meningkatkan kemampuan mereka dalam lebih meningkatkan kesadaran tentang diskriminasi gender dan sensor media berbasis gender, serta mengembangkan keterampilan mereka dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan gender, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis-gadis. Lokakarya ini juga memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berjejaring dengan rekan-rekan sejawat mereka di wilayah tersebut dan mengembangkan rencana tindakan khusus negara yang akan berkontribusi pada pelaporan yang lebih efektif dan peka terhadap isu-isu gender.

Dirancang bersifat multidisiplin, setiap rencana tindakan mempertimbangkan pendekatan yang akan mendorong kerjasama dan mengatasi tantangan umum yang terkait dengan pelaporan yang peka terhadap gender, keselamatan perempuan dan praktik media yang bertanggung jawab di beragam lanskap media Asia Tenggara. Rencana-rencana ini menawarkan inisiatif bersama bagi pekerja media, LSM, pembuat kebijakan, lembaga keagamaan dan masyarakat umum di wilayah tersebut.

Pendekatan Terpadu

Meskipun rencana-rencana tindakan dikembangkan secara individual, terdapat poin-poin dan tema-tema umum yang diidentifikasi di antara kelima rencana tindakan khusus negara:

- **Meluncurkan kampanye kesadaran publik.** Para pemangku kepentingan seharusnya, secara bersama-sama dan individu, meluncurkan kampanye kesadaran publik regional yang mendidik masyarakat umum tentang pentingnya mengurangi stereotip gender, mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi kekerasan berbasis gender.
- **Membangun keterlibatan dan kolaborasi.** Keterlibatan dan kolaborasi seharusnya diperkuat di antara para pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, pasukan keamanan nasional, organisasi media, LSM yang berfokus pada isu gender dan lembaga keagamaan. Para pemangku kepentingan seharusnya mendukung perubahan, termasuk dalam isu-isu yang terkait dengan kekerasan berbasis gender dan diskriminasi berbasis gender, serta mendorong kolaborasi yang memperkuat pemahaman tentang ancaman yang dihadapi perempuan, jurnalis perempuan, dan minoritas gender sehingga dapat lebih baik melindungi dan mendukung mereka.
- **Membangun kapasitas media dan LSM.** Para pemangku kepentingan seharusnya memberikan dan memanfaatkan pelatihan gender dan pengembangan untuk pekerja media guna memastikan mereka melaporkan isu-isu yang berkaitan dengan gender dengan akurat dan sensitif. Selain itu, peluang-peluang pengembangan kapasitas untuk LSM lokal dan organisasi masyarakat sipil (CSO) seharusnya disediakan untuk memperkuat advokasi mereka dalam isu-

isu gender dan pencegahan kekerasan.

- **Mencari dan membentuk dana.** Apabila memungkinkan, para pemangku kepentingan seharusnya membuat atau mencari dana regional dan program hibah yang didedikasikan untuk mendukung inisiatif dan literasi media yang berfokus pada gender, kekerasan terhadap perempuan, dan pemberdayaan perempuan, untuk memastikan sumber daya yang berkelanjutan bagi proyek-proyek yang relevan.

- **Mendukung kebijakan dan pedoman responsif gender.** Para pemangku kepentingan seharusnya mendukung pengembangan kebijakan, pedoman, dan kode etik yang responsif gender yang secara berkala diulas untuk memastikan bahwa organisasi media, pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mematuhi kebijakan dan hukum yang ada. Para pemangku kepentingan juga seharusnya menyuatkan adopsi program kesetaraan di ruang berita, termasuk kebijakan gender yang mendorong lingkungan inklusif dan mendukung sambil menghilangkan bias tugas berdasarkan gender serta peningkatan peluang pekerjaan bagi jurnalis perempuan.

- **Membentuk sistem pengumpulan dan pelaporan data.** Apabila memungkinkan, para pemangku kepentingan seharusnya membentuk sistem untuk mengumpulkan dan melaporkan data mengenai kekerasan berbasis gender dan diskriminasi di tempat kerja media, memungkinkan penilaian dan perbaikan yang berkelanjutan terhadap kondisi kerja. Selain itu, para pemangku kepentingan seharusnya melakukan tinjauan menyeluruh terhadap undang-undang, kebijakan, dan etika media yang ada di seluruh wilayah untuk mengidentifikasi kesenjangan dan area perbaikan yang terkait dengan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, serta praktik media.

- **Melaksanakan protokol keamanan ruang berita dan dukungan bagi jurnalis perempuan.** Mengembangkan dan melaksanakan protokol keamanan yang komprehensif, dukungan keamanan digital, serta dukungan mental dan fisik yang dirancang khusus untuk jurnalis perempuan, mengatasi risiko dan tantangan yang mungkin mereka hadapi di lapangan dan daring.

- **Mendirikan serikat buruh untuk jurnalis perempuan.**

Mendirikan serikat buruh khusus untuk jurnalis perempuan yang mencakup protokol keamanan, kebijakan, mekanisme perlindungan, dan pelatihan keamanan, berfokus pada kebutuhan dan tantangan unik mereka.

- **Mengembangkan dan menerapkan pendekatan persimpangan.** Para pemangku kepentingan seharusnya mengakui persimpangan gender dengan faktor-faktor lain seperti ras, etnis, dan orientasi seksual, serta merancang inisiatif yang sesuai untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh perempuan dengan latar belakang berbeda di seluruh wilayah. Para pemangku kepentingan juga seharusnya meningkatkan dan memperkuat kemitraan dengan kelompok hak perempuan, kelompok LGBTQIA+ dan organisasi hak pekerja migran.

- **Membentuk serikat mandiri para pemangku kepentingan.** Membentuk serikat mandiri yang mencakup berbagai mitra, termasuk pemangku kepentingan media, LSM, kelompok hak perempuan, kelompok advokasi LGBTQIA+, organisasi pendukung pekerja migran dan pemangku kepentingan lain yang relevan. Serikat ini seharusnya bekerja secara bersama-sama untuk menyuatkan pelaporan yang responsif gender, keamanan jurnalis perempuan dan isu-isu media terkait.

Rencana tindakan regional yang disatukan ini mempromosikan kerja sama dan kesadaran di lima negara, mengatasi tantangan umum terkait pelaporan yang responsif gender; keamanan perempuan dan minoritas gender, serta praktik media yang bertanggung jawab. Melalui pendekatan terpadu, diharapkan bahwa lingkungan media Asia Tenggara akan lebih memperbesar suara perempuan, melaporkan isu-isu gender secara lebih akurat dan sensitif, serta mempromosikan keamanan dan hak perempuan dan anak perempuan di seluruh wilayah.

Proyek lebih luas ini dipelopori oleh Aliansi Media Publik dengan dukungan dari Kantor UNESCO Bangkok dan Program Internasional UNESCO untuk Pembangunan Komunikasi (IPDC) dan bermitra dengan AWARE Singapura, Konde.co dan Klub Koresponden Asing Thailand.

Indonesia

Ditujukan bagi para pemangku kepentingan di Indonesia – termasuk organisasi media, organisasi non-pemerintah (LSM), badan pemerintah dan pembuat kebijakan – rencana ini bertujuan untuk mendorong pelaporan yang peka gender, meningkatkan keamanan perempuan dan mempromosikan praktik media yang bertanggung jawab. Ini melibatkan advokasi peraturan yang komprehensif, pelatihan gender, perlindungan hukum dan kampanye kesadaran publik, dengan tujuan akhir menciptakan lingkungan media yang menghormati keberagaman, menjunjung etika pelaporan dan melindungi wartawan perempuan serta komunitas rentan.

1

Memperkuat kolaborasi antara LSM dan organisasi media

Mendorong kolaborasi antara LSM dan organisasi media untuk menyediakan data, memfasilitasi pelaporan dan advokasi peraturan yang peka gender serta pelaporan jurnalistik mendalam, terutama tentang isu-isu gender.

2

Memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan Dewan Pers Indonesia

Membangun kerjasama yang efektif antara pemerintah dan Dewan Pers Indonesia untuk menciptakan dan menegakkan peraturan yang mendorong pelaporan yang peka gender dan etika media.

3

Mendorong pelatihan peka gender bagi para profesional media

Para pemangku kepentingan harus menawarkan pelatihan peka gender kepada pekerja media, termasuk jurnalis dan editor, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu gender dan mempromosikan pelaporan yang seimbang.

4

Berkomitmen pendekatan lintas sektoral

Mengakui dan mengatasi lintas sektoral gender dengan faktor-faktor lain seperti agama, etnis dan kelas sosial, menyesuaikan inisiatif untuk mengatasi tantangan yang unik dihadapi oleh perempuan dari latar belakang yang beragam dan minoritas gender.

5

Mengembangkan dan menerapkan panduan editorial untuk peka gender

Mengembangkan dan menerapkan panduan editorial yang mendorong media untuk melaporkan tentang gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dengan kepekaan, akurasi dan rasa hormat.

Indonesia

6

Menganjurkan perlindungan hukum bagi jurnalis

Menganjurkan perlindungan hukum terhadap diskriminasi dan pelecehan berbasis gender dalam industri media, memastikan bahwa wartawan perempuan memiliki jalan hukum ketika mereka menghadapi diskriminasi atau kekerasan.

7

Mengembangkan kode etik media

Organisasi media, asosiasi industri dan pemangku kepentingan terkait harus berkolaborasi untuk menciptakan kode etik yang komprehensif yang dirancang khusus untuk pekerja media. Kode ini harus menguraikan panduan perilaku yang bertanggung jawab dan etis, termasuk pelaporan yang peka gender dan perlakuan terhadap wartawan perempuan serta komunitas yang terpinggirkan.

8

Mencari dan mendirikan pendanaan

Mendirikan dana dan program hibah yang didedikasikan untuk mendukung inisiatif media yang berfokus pada gender, kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan, sehingga sumber daya berkelanjutan untuk proyek yang relevan.

9

Meluncurkan kampanye kesadaran publik

Mengatur kampanye kesadaran publik nasional dan lokal untuk mendidik masyarakat umum tentang pentingnya pelaporan yang peka gender dan dampak dari kekerasan terhadap perempuan dan gadis-gadis.

10

Mendirikan sistem pengumpulan dan pelaporan data

Mengembangkan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang disparitas gender, representasi gender, dan kekerasan serta pelecehan dalam organisasi media untuk memungkinkan intervensi dan kebijakan berdasarkan bukti, akuntabilitas, dan peningkatan industri.

Diterbitkan oleh Aliansi Media Publik
© Public Media Alliance 2023

Ide dan opini yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis sesuai dengan proyek penelitian terkait; mereka belum tentu merupakan milik UNESCO, Aliansi Media Publik, Konde.co, atau AWARE Singapura.

PMA mengucapkan terima kasih kepada UNESCO, Konde.co, AWARE Singapura dan peserta proyek atas bantuan dan dukungan mereka yang sangat berharga.

Editor: Desilon Daniels

Desain: Public Media Alliance

Gambar halaman depan: 1000 Words / Shutterstock.com

Vektor peta: twenty1studio / Shutterstock.com

